

Respon Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat atas Informasi dari CSO

Oleh Rizka Yuni Kartika (Forest Watch Indonesia)

Tata kelola hutan yang baik tidak dapat dipisahkan dari aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi, dengan adanya aspek tersebut membuka peluang lebih besar dalam mewujudkan pengelolaan hutan di Indonesia menjadi lebih baik. Tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi masyarakat yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan sampai pengawasan. Partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik, padahal akses informasi kepada masyarakat telah diberi landasan hukum yaitu Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan²⁶. Pada pasal 68 ayat 2 menyatakan bahwa:

Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan

Serta pada pasal 70 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan

Kedua pasal tersebut menjelaskan peran serta masyarakat atau perorangan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

Disisi lain, peranserta masyarakat juga dipengaruhi oleh ruang-ruang partisipasi yang disediakan dan diakomodasi oleh badan publik. Tanpa adanya ruang-ruang tersebut, masukan informasi, gagasan dan juga pendapat yang diberikan masyarakat tidak akan mendapat tempat dan tidak akan berguna. Selama ini kajian tentang bagaimana respon badan

publik terhadap masukan data dan informasi sangat minim sekali. Respon badan publik terhadap masukan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menilai bagaimana suatu badan publik dalam memberi ruang-ruang bagi publik dalam berpartisipasi.

Ketersediaan Ruang Partisipasi dalam Badan Publik

Melihat Pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010²⁷, maka sudah sewajarnya bagi setiap Badan Publik memberikan informasi kepada pihak luar dengan cepat, tepat, dan sederhana. Terkait dengan hal ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi. PPID berfungsi dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Namun sayangnya, terkait dengan fungsi PPID dalam pengelolaan data tersebut terlihat masih bersifat internal.

Data dan informasi yang dikelola oleh PPID sampai saat ini hanya data dan informasi yang khusus dikeluarkan oleh Badan Publik itu sendiri. Dan pertanyaannya kemudian yang muncul adalah bagaimana jika publik/masyarakat memiliki informasi, gagasan ataupun masukan yang dirasa penting untuk diketahui oleh Badan Publik? Adakah mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan informasi? Dan bagaimanakah respon Badan Publik atas informasi yang diberikan?

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa *Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana*

Forest Watch Indonesia, sebagai organisasi masyarakat sipil yang senantiasa berusaha mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan melalui penyediaan data dan informasi alternatif kehutanan, memandang perlu adanya mekanisme dari Badan Publik pada sektor kehutanan yang mengatur sirkulasi data dan informasi kehutanan baik internal maupun eksternal. Mekanisme ini sangat penting untuk mengakomodasi data dan informasi yang *disupport* oleh publik. Dan menilai bagaimana respon Badan Publik atas masukan informasi dari eksternal adalah indikasi awal untuk melihat apakah ruang bagi partisipasi publik itu disediakan oleh Badan Publik.

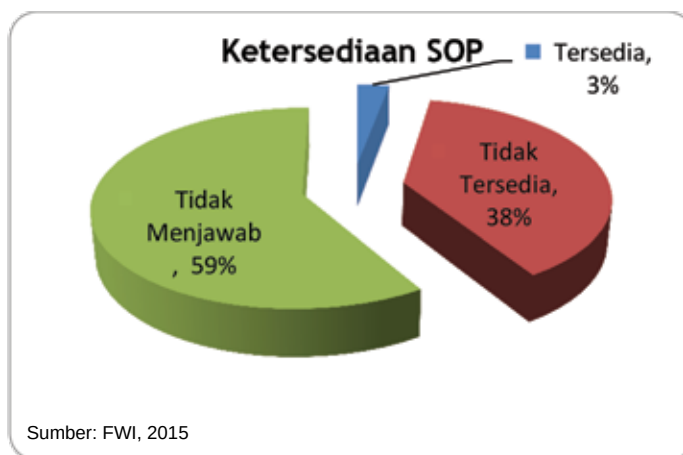
Kajian Uji Respon, Sasaran dan Metode Pendekatan

Kajian uji respon adalah kajian sederhana yang dilakukan FWI untuk mengukur respon Badan Publik di sektor kehutanan atas data dan informasi alternatif kehutanan serta masukan terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Data dan informasi kehutanan alternatif dalam bentuk buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009 – 2013 yang dihasilkan oleh FWI melalui proses pemantauan dan analisis yang mendalam terkait kondisi hutan dan penyebab perubahan tutupan hutan menjadi bahan uji yang dikirimkan kepada Badan Publik dalam kajian ini. Informasi yang disampaikan berupa data tutupan hutan alam dan perubahan tutupan hutan alam di tiap Provinsi yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Selain data tutupan hutan alam, buku ini juga berisikan hasil analisis FWI terhadap penyebab perubahan, kebijakan pengelolaan hutan yang ikut berperan, serta rekomendasi untuk perbaikan tata kelola hutan.

Kajian uji respon yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) bertujuan untuk melihat tingkat respon pemerintah ketika menerima data dan informasi alternatif serta masukan yang bersifat membangun oleh organisasi masyarakat sipil ataupun publik secara luas. Kajian sederhana ini dilakukan secara deskriptif untuk melihat bentuk respon yang diterima oleh FWI dari proses penerimaan informasi, konfirmasi dan wawancara dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Analisis data yang dilakukan menggunakan tabel Frekuensi dan Presentase yang diperkuat dengan Skala Likert. Ruang lingkup kajian ini meliputi: bagaimana distribusi data dari publik dapat diterima oleh pemerintah, bagaimana data yang diterima kemudian diinterpretasikan oleh pemerintah, serta bagaimana kemanfaatan data yang diterima dan apakah informasi tersebut dapat diintegrasikan atau dimanfaatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sasaran dari uji respon meliputi Pemerintah Daerah di 33 Provinsi dengan narasumber kunci yang merepresentasikan lembaga Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi yaitu sebanyak 33 Dishut yang terdaftar di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tidak termasuk sebagai sasaran kajian karena pada saat kajian ini dilakukan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara baru saja terbentuk. Pemilihan Dinas Kehutanan Provinsi sebagai sasaran uji respon dikarenakan institusi tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kehutanan di tingkat regional.

Gambar 1. Ketersediaan SOP Penerimaan Informasi di Dinas Kehutanan Provinsi



Hasil Uji Respon

Tahapan kajian uji respon diawali melalui pengiriman paket informasi dan respon angket terhadap Buku Potret Keadaan Hutan 2009-2013. Pengiriman paket informasi dilakukan melalui jasa pengiriman agar bisa dilakukan pengecekan apakah paket yang dikirimkan diterima oleh Badan Publik atau tidak. Kurang lebih seminggu setelah pengiriman paket informasi, berdasarkan hasil pengecekan di website jasa pengiriman, dipastikan bahwa semua paket sudah diterima oleh 33 Dishut Provinsi di seluruh Indonesia.

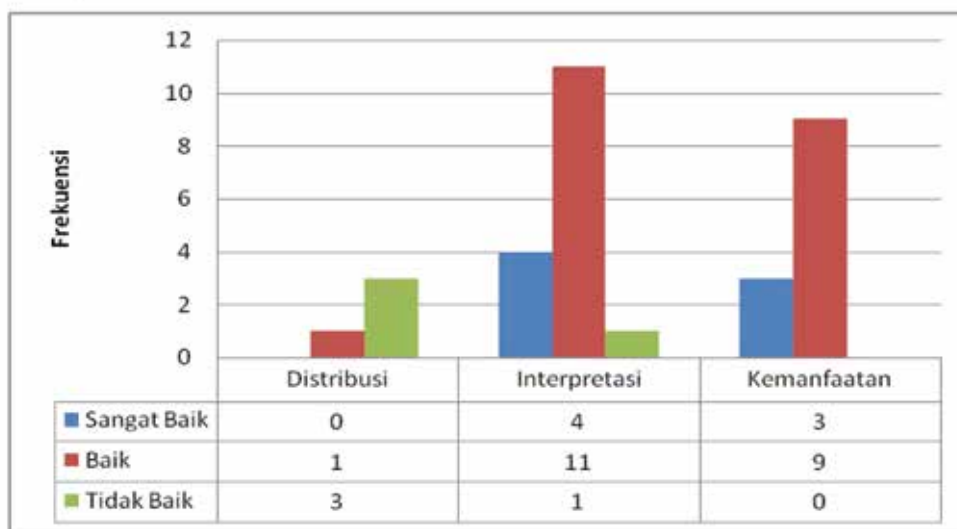
Terkait dengan respon yang diterima FWI setelah semua paket diterima dengan baik oleh Dishut Provinsi, respon yang diterima sangat jauh dari harapan. Dari 33 Dishut hanya 12% atau 4 Dishut yang memberikan respon aktif dan mengirimkan kembali angket sebagai data yang dibutuhkan dalam kajian uji respon ini. FWI kemudian melakukan konfirmasi atas data yang dikirimkan melalui telepon dan menanyakan ketersediaan mekanisme atau SOP (*Standard Operational Procedure*) tertulis untuk mengatur sirkulasi penerimaan informasi yang berasal dari pihak luar. Dalam proses konfirmasi inilah FWI kemudian mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Petugas pelayanan informasi cenderung tidak kooperatif dan berbelit dalam memberikan jawaban hingga sampai dengan nomor telepon Badan Publik tidak bisa dihubungi sama sekali. Dari sini, FWI kemudian melihat bahwa

sistem pengelolaan informasi di Badan Publik masih belum baik karena paket informasi yang nyata-nyata sudah diterima Badan Publik ternyata tidak diketahui keberadaannya. Bahkan kemudian diketahui juga bahwa ternyata belum ada prosedur yang jelas ketika menerima informasi dari pihak luar.

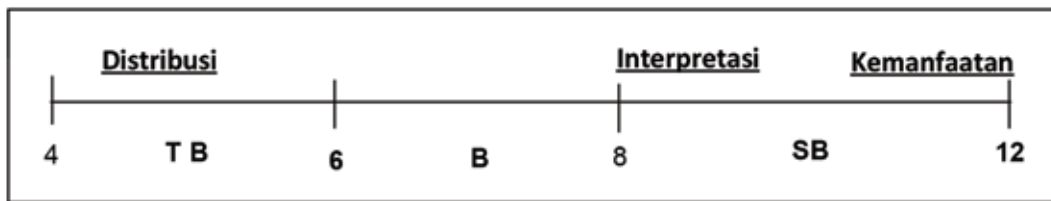
Berdasarkan hasil konfirmasi melalui telepon terkait dengan ketersediaan SOP penerimaan informasi, hanya ada satu atau 3 % dari keseluruhan Dishut menyatakan memiliki SOP yaitu Dishut Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 38% atau 13 Dishut menyatakan belum memiliki SOP. Sedangkan 19 Dishut atau sekitar 59 % yang lain tidak dapat dikonfirmasi dengan berbagai alasan antara lain seperti Badan Publik dapat dihubungi tetapi tidak memberikan jawaban, dapat dihubungi tetapi tidak ada petugas yang melayani dan badan publik tidak bisa dihubungi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Dishut Provinsi belum siap dalam menerima informasi dan masukan dari masyarakat.

Dengan keterbatasan data yang diterima, yaitu sebanyak 4 angket atau sekitar 12 persen dari keseluruhan angket yang seharusnya diterima, analisis kuantitatif uji respon pemerintah terhadap distribusi informasi yang diberikan para pihak dalam mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya hutan tetap dilakukan. Analisis dilakukan berdasarkan pada tiga aspek yaitu, **distribusi data**, **interpretasi data**, dan **kemanfaatan data**.

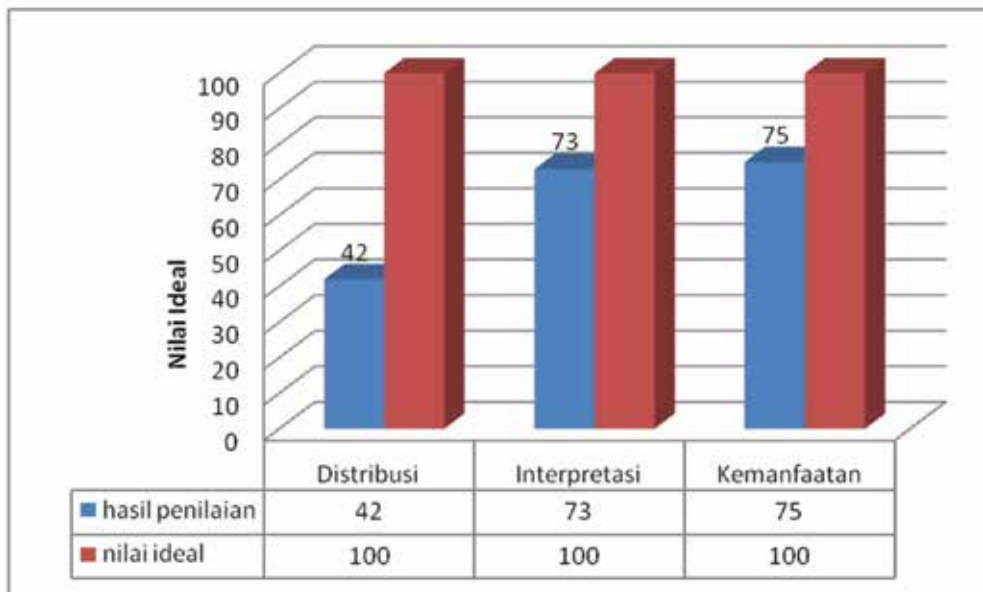
Gambar 3. Frekuensi Berdasarkan Klasifikasi Pembobotan Nilai Jawaban Pada Pertanyaan terkait dengan Distribusi, Interpretasi, dan, Kemanfaatan Data dan Informasi.



Gambar 4. Skala Linkert untuk Distribusi, Interpretasi, Kemanfaatan Data dan Informasi



Gambar 2. Persentase Hasil Penilaian terkait dengan Distribusi, Interpretasi, Serta Kemanfaatan Data dan Informasi



Aspek Distribusi data dan informasi

Hasil analisis FWI terkait dengan aspek distribusi data dan informasi yaitu: Frekuensi jawaban yang didapatkan, berdasarkan klasifikasi pembobotan nilai jawaban pada pertanyaan terkait dengan distribusi data dan informasi, terbanyak berada dalam kategori Tidak Baik (TB) atau tidak memenuhi dari kriteria yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis dengan metode likert, bobot nilai untuk distribusi data dan informasi di Dinas Kehutanan Provinsi sebesar 5 yang artinya berada di selang Tidak Baik (TB) yaitu $4 \leq TB \leq 6$. Sedangkan persentase hasil penilaian untuk distribusi data adalah 42 persen yang masuk dalam kriteria Tidak Baik. Berdasarkan 3 analisis tersebut menunjukkan bahwa data dan informasi

yang disampaikan oleh FWI kepada Badan Publik tidak terdistribusikan dengan baik dalam internal Badan Publik. Hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi yang menyebutkan bahwa Badan Publik yang dikaji belum semuanya memiliki SOP penerimaan informasi dari pihak luar.

Aspek Interpretasi data dan Informasi

Hasil analisis FWI terkait dengan aspek interpretasi data dan informasi yaitu: Frekuensi jawaban yang didapatkan, berdasarkan klasifikasi pembobotan nilai jawaban pada pertanyaan terkait dengan interpretasi data dan informasi, terbanyak masuk dalam kategori Baik (B) sebanyak 11 kali, Sangat Baik (SB) sebanyak 4 kali dan Tidak Baik (TB)



sebanyak 1 kali. Berdasarkan hasil analisis dengan metode likert, bobot nilai untuk distribusi data dan informasi di Dinas Kehutanan Provinsi sebesar 8,75 yang artinya berada di selang Sangat Baik (TB) yaitu $8 < SB \leq 12$. Sedangkan persentase hasil penilaian untuk interpretasi data dan informasi adalah 73 persen yang masuk dalam kriteria Sangat Baik. Berdasarkan 3 analisis tersebut menunjukkan bahwa data dan informasi yang diberikan, yaitu Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009 – 2013, dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan sangat baik oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Aspek Kemanfaatan data dan Informasi

Hasil analisis FWI terkait dengan aspek kemanfaatan data dan informasi yaitu: Frekuensi jawaban yang didapatkan, berdasarkan klasifikasi pembobotan nilai jawaban pada pertanyaan terkait dengan kemanfaatan data dan informasi, terbanyak masuk dalam kategori Sangat Baik (SB) sebanyak 9 kali dan Baik (B) sebanyak 3 kali. Berdasarkan hasil analisis dengan metode skala likert, bobot nilai untuk kemanfaatan data dan informasi di Dinas Kehutanan Provinsi sebesar 9 yang artinya berada di selang Sangat Baik (TB) yaitu $8 < SB \leq 12$. Sedangkan persentase hasil penilaian untuk kemanfaatan data dan informasi adalah 75 persen yang masuk

dalam kriteria Sangat Baik. Berdasarkan 3 analisis tersebut menunjukkan bahwa data dan informasi yang diberikan, yaitu Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009 – 2013, dapat menjadi referensi dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program di Dinas Kehutanan Provinsi.

Buruknya Respon dan Belum Terbukanya Ruang Untuk Berpartisipasi

Data dan informasi dalam buku PKHI 2009-2013 yang disusun oleh FWI secara umum mudah dipahami dan dapat menjadi bahan rujukan dalam perencanaan program kerja institusi pada Dinas Kehutanan Provinsi. Namun sayangnya, hanya 12 persen dari seluruh Dinas Kehutanan Provinsi di Indonesia yang memberikan respon aktif terhadap informasi ini. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar Dinas Kehutanan Provinsi belum memiliki SOP yang mengatur mekanisme dan sirkulasi informasi yang jelas. Disisi lain, komunikasi yang buruk dan berbelit menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi belum siap dalam mengakomodir ruang-ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam penyediaan informasi yang berguna dalam pengelolaan hutan. [end]